

Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi di Wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan

Supriady Rusli

Fakultas Ekonomi Unhalu Sulteng

Abstract: The study aimed to find out (1) an opportunity for the improvement of rice production which has not been utilized optimally yet; (2) the farmer's planting area; (3) agribusiness activities starting from farming, marketing and processing at the first stage in obtaining added value and absorption of labors. The result of the study indicate that the opportunity owned by South Sulawesi when it is used appropriately will provide greater profit compared to import rice, so that it will encourage the improvement of income and the absorption of labors. The farmers have not been able to maximize their income yet due to inefficiency in the utilization of production factors and are irresponsive to the change of rice price.

Keywords: Production of Rice, farmers income, Bosowasipulu, South Sulawesi.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat penting. Menurut Malassis (1975) paling tidak ada empat macam kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian yaitu: (1) Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan; (2) Kontribusi terhadap transfer sumber daya (tenaga kerja dan kapital); (3) Kontribusi terhadap pendapatan luar negeri (devisa) dan (4) Kontribusi terhadap penyediaan bahan pangan dan industri pengolahan. Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 menggariskan bahwa arah pembangunan pertanian dalam Repelita VI adalah untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Untuk itu dituntut suatu sistem pertanian yang maju, efisien dan tangguh sehingga mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutudan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka pendekatan pertanian perlu

diarahkan pada pendekatan yang sistematis yakni pendekatan berwawasan agribisnis yang bermuara kepada upaya kesejahteraan (*prosperity approach*) menggantikan pendekatan yang berorientasi kepada peningkatan produksi (*production approach*).

Reorientasi kebijakan dan arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut pada dasarnya adalah keinginan untuk dapat menjawab tantangan-tantangan masa depan, yang pada hakekatnya dilandasi pada keinginan untuk menangkap signal-signal positif dari adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan strategis baik berupa globalisasi (informasi, teknologi, pasar, dsb) maupun kondisi sumberdaya alam terutama di sektor pertanian (Gany, *et al.*, 1996).

Propinsi Sulawesi Selatan sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, bahkan akhir-akhir ini merupakan penyumbang terbesar untuk stok beras nasional. Hal ini memungkinkan karena potensi lahan persawahan daerah ini yang mencapai luas areal kurang lebih 600 ribu hektar, dimana lebih dari separuhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun. Produksi padi daerah ini terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 1999 tercatat produksi mencapai sekitar 4,15 juta ton gabah kering giling (GKG) atau sekitar 2,5 juta ton setara beras. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, daerah ini

Alamat Korespondensi:

Supriady Rusli, Fakultas Ekonomi Unhalu Sulawesi Tenggara, HP. 0811403452

memiliki surplus beras rata-rata sekitar 1.000.000 ton per tahun.

Dengan demikian, daerah ini secara kontinu mampu memasok beras dalam jumlah besar untuk kebutuhan stok pangan nasional. Usahatani padi secara tradisional merupakan tulang punggung kehidupan ekonomi pedesaan Sulawesi Selatan. Keluarga yang hidup dari sektor pertanian berjumlah kurang lebih satu juta kepala keluarga (KK) yang meliputi 63% dari total kepala keluarga (KK) penduduk Sulawesi Selatan (Anonim, 2001). Dari jumlah KK petani tersebut sekitar 82% mengelola usahatani padi dan palawija. Ironisnya sebagian terbesar dari keluarga tani ini tergolong penduduk yang berpenghasilan rendah, dan jika dibandungkan dengan sektor lain (non pertanian) fenomena seperti ini akan memberikan deskripsi antara kepentingan nasional dilain pihak. Untuk itu diperlukan penanganan pembangunan usahatani padi yang proporsional, namun hal ini merupakan sesuatu yang tidak sesederhana dengan yang dibayangkan.

Untuk memacu pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Selatan, maka ditetapkan strategi dasar pembangunan regional yang dikenal dengan Tri Program (Pewilayahan Komoditas, Perubahan Pola Pikir dan Petik Olah Jual). Untuk komoditas beras telah diupayakan pengalokasiannya secara khusus pada enam kabupaten yaitu Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu (Bosowasipulu) dan dilaksanakan secara terprogram yang kemudian dikenal dengan Pro-gram Bosowasipulu. Program ini pada gilirannya diharapkan dapat memperkokoh potensi dan kontribusi Sulawesi Selatan sebagai pemasok beras untuk stok nasional dan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pada daerah ini.

Produksi hasil pertanian sampai saat ini belum mencapai sesuai yang diharapkan, hal ini terjadi karena berbagai penyebab antara lain petani padi di Negeri ini terutama petani padi sawah di wilayah Sulawesi belum bisa mengadopsi teknologi yang dikembangkan di Negara-negara maju pertaniannya. Pihak lain yang sangat berperang penting dalam usahatani padi adalah pemerintah sebagai pembuat keputusan strategis yang diharapkan berperang aktif membuat regulasi demi peningkatan produksi dan pendapatan petani padi. Di samping itu, pula pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang berkaitan pemenuhan kebutuhan

bahan makanan pokok demi kepuasan konsumen dalam negeri.

Sebenarnya jikalau petani padi dalam negeri mampu seperti petani padi di negara maju sektor pertaniannya seperti Jepang yang mampu menghasilkan 12 ton GKG/ha permusim tanam, Thailand mampu menghasilkan 10–11 ton GKG/ha permusim dan beberapa negara di Benua Amerika dan Eropa serta Australia, maka Indonesia dapat menjadi negara peng-ekspor bahan makanan pokok khususnya beras, karena ditunjang oleh potensi lahan pertanian yang sangat luas dan kondisi iklim yang baik serta mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi.

Di Sulawesi Selatan mempunyai lahan pertanaman padi yang sangat strategis dan cukup luas, di samping itu, yang menjadi faktor pendukung adalah terdapat sarana irigasi teknis yang cukup baik dan mampu mengairi lahan sawah pada setiap musim. Kalau wilayah Bosowasipulu terdapat beberapa irigasi teknis yang tersebar di daerah-daerah yang cukup potensial dan mampu mengairi lahan sawah sampai ratusan hektar, bahkan dapat digunakan juga dari berbagai kegiatan lain seperti proyek air bersih dan dapat diminum oleh masyarakat setempat. Di pulau Jawa petani sudah mampu menghasilkan 8 ton GKG/ha permusim tanam, sedangkan petani di Sulawesi Selatan sampai sekarang ini hanya mampu menghasilkan rata-rata 4–5 ton GKG/ha permusim tanam, makanya jangan heran kalau sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang defisit akan bahan makanan pokok beras. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pembuat keputusan/kebijakan dan bagi petani sebagai pelaku usahatani padi yang senantiasa mencari terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam rangka memacu dan mendorong percepatan peningkatan produksi padi GKG yang diharapkan bisa menyamai produktivitas usahatani padi negara-negara yang maju sektor pertaniannya. Perlu disadari bahwa Indonesia adalah negara besar dan subur tanah yang dimiliki sehingga kedepan bisa menjadi peng-ekspor beras terbesar di Asia tenggara. Sangat disayangkan kalau terjadi pergantian pemimpin negara, akan tetapi sektor pertanian saja belum bisa maju dan berkembang, apalagi sektor lain yang bisa menunjang sektor pertanian belum juga memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan perberasan nasional dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani padi di wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan.

METODE

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dipilih Kabupaten Bosowasipulu diambil sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sentra Produksi padi di Sulawesi Selatan
- Produksi padi di wilayah tersebut belum optimal
- Sarana dan prasarana usahatani yang cukup memadai
- Luas dan potensi lahan sawah yang cukup
- Ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap.

- Tahap pertama adalah pengumpulan data sekunder berupa potensi wilayah persawahan, luas areal, jenis tanah, penggunaan lahan dan iklim, perkembangan produksi, potensi penduduk, kebijakan pemerintah dan kelembagaan.
- Tahap kedua adalah pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada petani, pedagang pengumpul, pemilik penggilingan, dan para pelaku yang terkait atau metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dengan penekanan pada: (1) Tingkat pengelolaan usahatani padi pada dua musim tanam yaitu gadu dan rendengan; (2) Tingkat produksi dan pendapatan; (3) Pemasaran hasil panen.

Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat maka data yang ada dapat dianalisis secara kualitatif dan secara kuantitatif, dengan model analisis secara tabulasi dengan pendekatan analisis pendapatan usahatani, dan analisis *Domestic Resource Cost (DRC)*, sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif dengan penekanan pada kendala dan prospek pengembangan usahatani padi sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah.

HASIL

Pendapatan Usahatani Padi

Usahatani padi di Sulawesi Selatan memiliki wilayah sentra produksi, termasuk pada lokasi penelitian ini. Oleh sebab itu, yang menyangkut besar-besaran adalah luas areal pertanaman, produksi gabah, produktivitas lahan sawah dan lain-lain. Pada Tabel 1. dapat dilihat angka rata-rata luas areal tanaman padi, besarnya produksi dan tingkat produktivitas lahan untuk masing-masing kabupaten dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa produksi gabah pada musim gadu sebesar 4.300 kg dengan perlakuan kebijakan subsidi *input*, dan 4.700 kg dengan perlakuan kebijakan subsidi harga dasar gabah, serta 4.000 kg dengan tanpa perlakuan kebijakan subsidi atau kondisi awal.

Untuk menelusuri struktur kompleksitas pendapatan petani padi maka terdapat sedikitnya dua hal yang perlu dicermati. *Pertama*, adalah struktur biaya dan pendekatan dalam suatu sistem produksi usahatani. *Kedua*, adalah kinerja lembaga agribisnis sebagai satu sistem di mana usahatani padi merupakan salah satu subsistem yang ada di dalamnya. Hal-hal inilah yang akan ditelusuri pada bagian berikut, dan lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai produksi padi pada musim tanam gadu sebagai dampak adanya berbagai penerapan kebijakan pemerintah sangat bervariasi. Pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai produksi padi dengan penerapan kebijakan subsidi input sebesar Rp3.010.000,-/ha/MT. Sedangkan nilai produksi pada saat penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah sebesar Rp7.473.000,-/ha/MT. Pada Tabel 1 juga di atas dapat diketahui bahwa nilai produksi padi pada saat belum ada penerapan kebijakan subsidi sebesar Rp2.800.000,-/ha/MT, atau biasa juga disebut sebagai nilai pasar, artinya harga gabah yang berlaku berdasarkan kesepakatan antara produsen dan konsumen.

Biaya faktor-faktor produksi juga bervariasi seiring dengan penerapan kebijakan pemerintah dimana hal ini dapat dilihat pada penerapan kebijakan subsidi *input*, total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani sebesar Rp1.153.500,-/Ha/MT. Demikian pula pada saat penerapan subsidi harga dasar gabah maka

Tabel 1 Pendapatan Usahatani Padi dengan Penerapan Kebijakan Subsidi pada Musim Tanam Gadu, Tahun 2008 (dalam 1 Ha)

| No. | Keterangan | Kebijakan | | |
|-----|------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | Subsidi Input | Subsidi Harga Dasar | Non Subsidi |
| 1. | Produksi (Kg/MT) | 4.300 | 4.700 | 4.000 |
| 2. | Harga GKG (Rp/Kg) | 700 | 1.595 | 700 |
| 3. | Nilai Produksi (Rp/MT) | 3.010.000 | 7.473.000 | 2.800.000 |
| 4. | Biaya Input Produksi (Rp/MT) | 603.500 | 970.000 | 710.000 |
| | Bibit, pupuk, obat-obatan | 550.000 | 950.000 | 500.000 |
| 5. | Pengolahan dan lain-lain | 1.153.500 | 1.920.000 | 1.210.000 |
| | Total Biaya (TC/MT) | 1.856.500 | 5.553.000 | 1.590.000 |
| | Pendapatan Petani (Rp/MT) | | | |

(Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2008)

total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani padi dengan adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah sebesar Rp1.920.000,-/Ha/MT. Sedangkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani padi pada saat belum adanya penerapan kebijakan subsidi yaitu sebesar Rp1.210.000,-/Ha/MT.

Pada Tabel 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya penerapan kebijakan subsidi pemerintah dengan sendirinya dapat mempengaruhi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh petani padi. Selanjutnya dapat diketahui pendapatan petani padi pada saat adanya penerapan kebijakan subsidi pemerintah sangat bervariasi baik pada musim tanam gadu maupun musim tanam rendengan, hal ini dapat dilihat pendapatan petani dengan penerapan kebijakan subsidi *input* sebesar Rp1.856.500,-/ha/MT. Pendapatan petani dengan adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah sebesar Rp5.553.000,-/Ha/MT. Sedangkan pendapatan petani padi pada saat belum ada penerapan kebijakan subsidi sebesar Rp1.590.000,-/Ha/MT.

Uraian tersebut di atas memberi gambaran bahwa kegiatan usahatani padi sebagai dampak/akibat adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah pemerintah, akan meningkatkan pendapatan petani padi di wilayah Bosowasipulu.

Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi padi/gabah pada musim tanam (MT) renda dengan adanya penerapan kebijakan *input* sebesar 4.100 kg/ha/MT, produksi padi/gabah pada musim tanam (MT)

rendengan dengan adanya penerapan kebijakan harga dasar gabah sebesar 4.300 kg/ha/MT, dan produksi padi/gabah pada musim tanam (MT) rendengan dengan tanpa ada penerapan kebijakan subsidi pemerintah sebesar 3.500 kg/ha/MT.

Tabel 2 Pendapatan Usahatani Padi dengan Kebijakan Subsidi Pada Musim Tanam Rendengan, Tahun

| No. | Keterangan | Kebijakan | | |
|-----|------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | Subsidi Input | Subsidi Harga Dasar | Non Subsidi |
| 1. | Produksi (Kg/MT) | 4.100 | 4.300 | 3.500 |
| 2. | Harga GKG (Rp/Kg) | 700 | 1.595 | 700 |
| 3. | Nilai Produksi (Rp/Ha) | 2.870.000 | 6.858.500 | 2.450.000 |
| 4. | Biaya Input Produksi (Rp/Ha) | 603.500 | 1.110.000 | 710.000 |
| | Bibit, pupuk, obat-obatan | 600.000 | 950.000 | 500.000 |
| 5. | Pengolahan dan lain-lain | 1.203.500 | 2.060.000 | 1.210.000 |
| | Total Biaya (TC/MT) | 1.666.500 | 4.798.500 | 1.590.000 |
| | Pendapatan Petani (Rp/Ha) | | | |

2008, (dalam 1 Ha)

(Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2007)

Harga gabah kering giling (GKG) bervariasi karena berdasarkan penerapan kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada setiap daerah. Harga GKG dengan penerapan kebijakan subsidi *input*, dan tanpa penerapan kebijakan subsidi pemerintah sebesar Rp700,-/kg. Sedangkan dengan adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah secara nasional maka untuk wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan ditetapkan harga GKG sebesar Rp1.595,-/Kg.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang ada menunjukkan bahwa nilai produksi pada musim tanam (MT) rendengan sebagai dampak adanya berbagai penerapan kebijakan pemerintah sangat bervariasi. Nilai produksi dengan penerapan kebijakan subsidi input sebesar Rp2.870.000,-/Ha/MT. Nilai produksi dengan penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah sebesar Rp6.858.500,-/Ha/MT. Sedangkan nilai produksi padi pada saat belum adanya penerapan kebijakan subsidi sebesar Rp2.450.000,-/Ha/MT.

Biaya faktor-faktor produksi juga bervariasi seiring dengan penerapan kebijakan pemerintah dimana hal ini dapat dilihat pada penerapan kebijakan subsidi input, total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani sebesar Rp1.203.500,-/Ha/MT. Total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dengan adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah sebesar Rp2.060.000,-/Ha/MT. Sedangkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dengan tanpa penerapan kebijakan subsidi sebesar Rp1.210.000,-/Ha/MT.

Pada Tabel 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya penerapan kebijakan subsidi pemerintah dapat mempengaruhi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh petani pada musim tanam (MT) rendengan. Pendapatan petani padi dengan adanya penerapan kebijakan subsidi pemerintah sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat pendapatan petani dengan penerapan kebijakan subsidi input sebesar Rp1.666.500,-/Ha/MT. Pendapatan petani dengan adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah sebesar Rp4.798.500,-/Ha/MT. Sedangkan pendapatan petani dengan tanpa penerapan kebijakan subsidi sebesar Rp1.590.000,-/Ha/MT.

Uraian tersebut di atas memberi gambaran bahwa kegiatan usahatani padi sebagai dampak/akibat adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah pemerintah, akan lebih meningkatkan pendapatan petani padi di wilayah Bosowasipulu baik pada musim tanam (MT) gadu maupun musim tanam (MT) rendengan.

Harga gabah kering giling (GKG) bervariasi karena berdasarkan penerapan kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada setiap daerah. Harga GKG dengan penerapan kebijakan subsidi input, dan tanpa

penerapan kebijakan subsidi pemerintah sebesar Rp700,-/kg. Sedangkan dengan adanya penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah secara nasional maka untuk wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan ditetapkan harga GKG sebesar Rp1.595,-/Kg.

Uraian di atas memberi gambaran bahwa pendapatan petani dari usahatani padi yang paling memberikan keuntungan yang besar bagi petani adalah jika ada penerapan kebijakan subsidi harga dasar gabah baik pada musim tanam gadu maupun pada musim tanam rendengan. Berdasarkan pengalaman dari Negara-negara maju dalam bidang pertaniannya, seperti Jepang, Thailand dan beberapa Negara yang berada di Benua Amerika, Eropa dan Australia. Jika negara itu dikehendaki maju sektor pertaniannya maka seharusnya diberikan subsidi baik kepada petani maupun kepada konsumen, yang dikenal dengan istilah kebijakan *floor price* dan kebijakan *ceiling price* atau kebijakan harga dasar dan kebijakan harga tertinggi, hal ini penting terutama pada tanaman padi, dimana komoditas beras sebagai komoditas politis.

Berdasarkan temuan empiris di atas menunjukkan bahwa ada persamaan perlakuan antara teori dan temuan empiris, sehingga apa yang temuan dalam penelitian ini sedapat mungkin dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan keputusan bagi pemerintah demi tercapainya kemakmuran masyarakat petani dan masyarakat yang bukan petani sebagai konsumen bahan makanan beras. Di samping itu, bagi petani padi dapat dijadikan acuan dalam bercocok tanam demi peningkatan produksi dan pendapatannya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari responden maka dapat diketahui potensi sumberdaya yang dimiliki wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan dikawasan timur Indonesia. Perlu diketahui secara bersama bahwa produksi beras wilayah Bosowasipulu setiap tahunnya mengalami surplus sehingga dapat diperdagangkan ke daerah yang masih defisit produksinya. Lebih jelasnya dapat disajikan pada hasil analisis berikut ini:

- a. Biaya produksi/Ha/MT = Rp2.253.300
 - Tenaga kerja = Rp1.214.300
 - Sarana produksi = Rp670.600
 - Lain-lain = Rp368.400
- b. Rerata produksi GKG/Ha = 4.500 kg
- c. Harga GKG/Kg = Rp700
- d. Nilai Produksi = Rp3.150.000

- e. Biaya produksi /Kg = Rp500,7
- f. Pendapatan petani/Ha = Rp896.700
- g. Pendapatan usahatani/Kg = Rp199,3
- h. R/C Ratio = 1,71

Perlu dipahami bahwa data komoditas padi/beras yang dianalisis adalah varietas IR 66 di mana produksinya dapat mencapai 4.500 kg/Ha. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan atau terlihat besarnya biaya-biaya yang harus digunakan dalam pengelolaan usahatani padi tersebut yang berturut-turut adalah biaya tenaga kerja menyusul biaya sarana produksi dan berbagai biaya lain-lain.

Adapun harga jual komoditas Gabah Kering Giling (GKG) tersebut sebesar Rp700/kg, sedangkan biaya pokoknya sebesar Rp199,4/Kg. Jadi perhitungan pendapatan petani padi/ha mencapai sebesar Rp896.700,- dari angka tersebut menunjukkan bahwa komoditas padi/beras di wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan masih sangat layak untuk dikembangkan dan diusahakan karena R/C sebesar 1,71. di mana teori mengatakan bahwa apa bila R/C di atas angka 1 yang berarti usaha tersebut masih layak dikembangkan atau dilanjutkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan karena terdapat keunggulan komparatif untuk memproduksi beras jika dibandingkan dengan mengimpor beras, artinya wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan masih perlu dinaikkan produksi padinya sehingga dapat memberikan sumbangan beras ditingkat nasional sebagai wujud kepedulian terhadap sesama warga negara, yang dipahami bersana bahwa masih ada beberapa daerah yang tidak mampu memberikan sumbangan beras ditingkat nasional karena produksi berasnya rendah sehingga hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

Perlu diketahui bersama bahwa kedepan terdapat tantangan serius karena akan semakin meningkat konsumsi beras dalam negeri sebagai akibat adanya pertambahan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan produksi beras, hal ini sesuai teori Malthus mengatakan bahwa pertambahan penduduk sebagai deret ukur sedangkan produksi bahan makanan sebagai hitung, hal lain sebagai penyebab rendahnya produksi beras dalam negeri karena alih fungsi, artinya banyak lahan

persawahan di-jadikan sebagai lahan perkotaan terutama lahan sawah yang ada di pinggiran kota-kota yang tersebar diseluruh republik ini, hal lain lagi ada beberapa lahan pertanaman padi atau lahan sawah dialih fungsikan sebagai daerah kawasan industri.

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa apa bila nilai koefisien *Domestic Resources Cost (DRC)* mencapai sebesar 0,1524, maka wilayah atau daerah lokasi persawahan tersebut perlu dikembangkan terus karena masih sangat menguntungkan petani jika produksi beras dalam negeri dilakukan, dibandingkan dengan mengimpor beras dari negara lain, seperti Jepang dan Thailand. Hasil analisis sensitifitas berdasarkan beberapa skenario dengan adanya perubahan nilai kurs mata uang rupiah terhadap kurs nilai mata uang dollar U.S.

Hal ini memperlihatkan bahwa keunggulan wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan untuk memproduksi beras tetap terjamin, petani tidak perlu cemas jika ada beras impor yang beredar dipasaran. Artinya secara rasional harga beras diwilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan harga beras impor, dengan asumsi tidak politik dumping yang berlaku. Oleh sebab itu peluang yang dimiliki wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi petani padi dibanding dengan mengimpor beras, sehingga dengan demikian tentunya akan mendorong peningkatan pendapatan para petani padi, menambah pendapatan wilayah, dan akan meningkatkan produksi beras dalam negeri serta dapat memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, yang lain lagi dapat meningkatkan kepuasan bagi konsumen lokal maupun nasional, dimana 90% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras dan hanya 10% mengkonsumsi non beras seperti Sagu, Jagung dan Umbi-umbian serta kacang-kacangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa penemuan yang merupakan landasan dasar

untuk merumuskan simpulan. Adapun yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat penting dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan usahatani padi di wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan.
- Hasil penelitian di wilayah Bosowasipulu menunjukkan bahwa adanya perlakuan kebijakan subsidi harga pada tanaman padi baik pada musim tanam gadu maupun rendengan mempunyai dampak positif yang lebih baik karena dapat meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani padi, hal ini dapat dibandingkan dengan penerapan kebijakan subsidi input, demikian pula pada saat belum di-berlakukan kebijakan subsidi kepada usahatani padi produksi dan pendapatan petani jauh lebih rendah.
- Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa usahatani padi di wilayah Bosowasipulu tidak mempunyai prospek yang baik dan para petani padi tidak perlu cemas dan takut akan adanya kebijakan pemerintah mengimpor beras setiap tahunnya, karena hasil analisis dan per-hitungan dengan metode *Domestic Resources Cost (DRC)* menunjukkan bahwa nilai koefisien masih di bawah satu, artinya bahwa lokasi persawahan di wilayah Bosowasipulu masih perlu dikembangkan karena masih sangat menguntungkan petani dalam di wilayah tersebut jika dibandingkan dengan mengimpor beras dari negara lain. Hal ini memperlihatkan bahwa keunggulan wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan untuk memproduksi beras tetap terjamin, petani tidak perlu cemas jika ada beras impor yang beredar dipasaran. Artinya secara rasional harga beras di wilayah Bosowasipulu Sulawesi Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan harga beras impor, dengan asumsi tidak politik dumping yang berlaku.

Saran

Adapun yang menjadi saran berkaitan dengan penelitian tersebut di atas adalah:

- Sangat diharapkan campur tangan pemerintah terutama penetapan harga GKG yang lebih tinggi/ tepat dan perpiahak kepada petani sebagai produsen.
- Sangat diharapkan adanya Subsidi pemerintah tentang kebijakan *input*
- Sangat diharapkan adanya bantuan kredit lunak bagi petani padi sebagai tambahan modal kerja bagi petani padi
- Sangat diharapkan petugas pertanian agar senantiasa melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada petani padi
- Petani seharusnya lebih termotivasi dalam mengelola usahatannya dan berusaha mencari terobosan baru dalam rangka peningkatan produksi di berbagai musim tanam.

DAFTAR RUJUKAN

- Amang, B. 1993. *Ekonomi Perberasan Jagung dan Minyak Sawit di Indonesia*. Jakarta: Dharma Karsa Utama.
- . 1995. *Kebijakan Pangan Nasional*. Jakarta: Dharma Karsa Utama.
- Arifin, B. 1994. *Pangan dalam Orde Baru*. Koperasi Jasan Informasi (Kopindo) Jakarta.
- Dillon, J.L., and J. Brian, H. 1993. *Farm Development*. FAO-The United Nations: Rome.
- Gany, R.A. 1994. *Pembangunan Sistem Pendidikan Pertanian dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian*. Prosiding Lokakarya Nasional Perhepi, PERHEPI. Jakarta.
- , Abu Laddong, Sofyan Jamal, Adri Said dan Mahyuddin. 1996. Studi Pola Pengembangan Agribisnis Padi di Kawasan Bosowasipulu Sulawesi Selatan Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulawesi Selatan dengan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UNHAS (tidak dipublikasikan).
- Raines, S. 1979. *Agricultural Policy*, University of Nerbraska Press Lineolin.
- Rusli, S. 1995. *Efektivitas Pemanfaatan Makassar Mall Kodya Makassar dalam rangka Melancarkan Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian di Sulaewsi Selatan*, Tesis PPS Unhas, Makassar.
- . 2003. *Analisis Kebijakan Perberasan Nasional di Tinjau dari Penawaran di Sulawesi Selatan*, Disertasi PPS Unhas, Makassar.
- . 2005. *Metodologi Penelitian*. UNHALU PRESS. Kendari
- . 2006. *Pemasaran Teori dan Aplikasi*. UNHALU PRESS. Kendari
- Salahuddin, S. 1998. *Kebijakan Pembangunan Pertanian Pasca Orde Baru*. Jakarta: LPEUI.
- Scott, J. 1981. *Moral Ekonomi Petani*, Pergolakan dan Subsistansi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ED.